BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Somalia

Republik Demokratik Somalia adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur Afrika, di Samudera Hindia dan Teluk Aden. Negara ini berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia dan Kenya. Keseluruhan populasi Somalia diperkirakan sekitar 6.000.000 jiwa. Negara ini juga memiliki populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia. Kelompok etnis di negara ini mencakup Somalia (98%) dan Arab serta Asia (2%). Bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Arab dan Somalia (keduanya bahasa resmi), Inggris juga Itali. Islam (Sunni) adalah agama utama. Tingkat baca tulis diperkirakan sekitar 40% (sumber: http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=SOMALIA – diakses pada 5 Juni 2010).

Pemerintah negara ini pada tahun 1990 berbentuk republik. Berdasarkan konstitusi tahun 1979, presiden dinominasikan oleh Komite Pusat Partai Sosialis Revolusioner Somalia (*Central Committee of the Somali Revolutionary Socialist Partay*) dan dipilih oleh Sidang Rakyat (*People's Assembly*) untuk masa jabatan enam tahun. Sidang ini dinominasikan oleh partai dan dipilih oleh suara terbanyak untuk masa jabatan lima tahun, dan enam anggota yang ditunjuk oleh presiden. Pengadilan terdiri dari pengadilan distrik, pengadilan regional, mahkamah banding dan mahkamah agung (sumber: sumber: http://huripedia.id-hrdocs.org/index.php?title=SOMALIA – diakses pada 5 Juni 2010).

3.1.1. Sejarah Somalia

Republik Somalia adalah bekas wilayah jajahan negara-negara Eropa, terletak di bagian timur Somalia di Tanduk Afrika. Somali kira-kira terletak di antara Ethiopia, Djibouti dan Teluk Aden, dengan wilayah seluas 137.600 km². Ibu kota Somalia ialah Mogadishu (sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Somalia - diakses pada 11 Juni 2010).

Masyarakat Somalia terbagi menjadi *clan* dan *sub-clan, sub-clan* itu sendiri berada dibawah *clan* yang kemudian seterusnya berlanjut hingga menjadi satuan negara. Lima *clan* tersebut ialah Darod, Hawiya, Isaak, Dir dan Digil-Mirifleh. Namun, dalam perjalanannya keinginan untuk mepersatukan kependudukan Somalia itu menemui kegagalan yang berujung terhadap kekalahan militer dan konflik internal yang kemudian tumbuh.

Pada Mei 1991, klan-klan di daerah utara yang sekarang disebut dengan Somali Land memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun tidak diakui oleh kebanyakan negara, entitas ini masih tetap ada dengan bantuan klan berkuasa yang sangat berpengaruh dan infrastruktur ekonomi bekas peninggalan program kerjasama militer dengan Inggris, Rusia dan Amerika Serikat.

Somalia dahulunya berupa Protektorat Britania. Tidak lama kemudian setelah Somalia Britania merdeka, dia bergabung dengan Somalia Italia untuk membentuk Somalia pada 1960. Perdana menteri Somalia Britania, Ibrahim Egal, menjadi salah satu menteri di Republik Somalia. Ia menjadi Perdana Menteri pada 1967 tetapi digulingkan melalui kudeta pada 1969.

Pada 1991, setelah ambruknya pemerintah Somalia, wilayah di bagian barat laut Somalia ini memproklamasikan kemerdekaan Republik Somalia, meskipun hampir tidak ada kalangan internasional yang mengakui kedaulatannya. Egal dilantik sebagai presiden pada 1993, terpilih kembali pada 1998 dan tetap berkuasa hingga dirinya meninggal pada 03 Mei 2002. Wakil presiden Dahir Riyale Kahin menggantikan posisi Egal.

Sejak meraih kemerdekaan, Somalia telah berupaya menguasai daerah Sanaag dan Sool. Kolonel Abdullahi Yusuf telah memimpin beberapa penyergapan untuk mempertahankan wilayah tersebut yang diyakini oleh Punt Land sebagai bagian dari wilayahnya. Upaya Somali Land untuk memproklamasikan kemerdekaannya menjadi sulit tanpa Sanag dan Sool karena wilayah Somali Land sekarang tidak memadai dari segi ekonomi.

3.1.2. Pembagian Wilayah Somalia

Pada bagian tengah bendera Somalia terdapat gambar bintang putih yang memiliki lima segi. Bintang ini merupakan lambang bahwa sebenarnya wilayah Somalia mencakup lima wilayah, yang keseluruhannya disebut dengan Somalia Raya.

Dua di antara wilayah tersebut yaitu Somali Land dan Punt Land terbentuk dan bersatu mulai dari tahun 1960 hingga 1991. Keduanya disebut dengan Republik Somalia. Namun sejak tahun 1991, keduanya terpecah dan memiliki pemerintahan masing-masing. Sedangkan tiga wilayah lainnya bisa dinamakan dengan wilayah Somalia yang hilang. Karena hingga saat ini, wilayah tersebut

masih terpisah dengan Somalia, atau telah menjadi bagian dari negara tetangga. Lima wilayah tersebut adalah:

1. Somalia Italia

Wilayah ini dikenal dengan nama Somalia Italia karena ia adalah bekas jajahan Italia. Somalia Italia merupakan wilayah terluas dibanding wilayah lainnya. Wilayah ini meraih kemerdekaan dari Italia pada tanggal 1 Juli 1960, kota terpenting di wilayah ini adalah Mogadishu, ibu kota Somalia saat ini.

Sejak meletusnya perang saudara di Somalia (1991), Somalia Italia terpecah-pecah lagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang saling terpisah. Di antara wilayah yang terpecah ini adalah:

- **Negeri Punt** ***(Punt Land)***, terletak di sebelah Timur Laut Somalia. Luas wilayahnya sekitar 200.000 km2, atau 33% dari luas seluruh wilayah Somalia. Punt Land dihuni oleh sekitar 2,5 juta penduduk. Sejak Agustus 1998, Dewan Suku di wilayah ini mengumumkan pemerintahan mandiri secara sepihak. Sejak saat itu, terpilihlah Abdullahi Yusuf sebagai presiden di wilayah ini.
- **Wilayah Somalia Barat Daya** Wilayah Somalia Barat Daya terbentuk pada April 2002 dengan nama "Kiyan Janub Gharbiy Al-Shumal". Wilayah ini menjadikan kota Baidoa sebagai ibukotanya. Di bawah kepemerintahan Kolonel Hasan Muhammad Nur.
- **Wilayah Jalka'iu** Wilayah ini terbentuk pada Oktober 2002 atas prakrasa dari kepala-kepala suku dan para pemuka agama. Wilayah ini terletak di sebelah timur laut Somalia. Nama wilayah ini diambil dari nama sebuah

daerah di Somalia yang bernama Jalka'iu. Mayoritas penduduknya berasal dari suku Hawiya dan Darod. Wilayah Jalka'iu ini membangun hubungan diplomasi dengan wilayah Punt Land.

- **Wilayah Kekuasaan Pemerintahan Transisi** Selain tiga wilyah di atas, sisa dari wilayah Somalia Italia saat ini adalah wilayah dari pemerintahan transisi. Namun untuk saat ini. Pemerintahan transisi hanya menguasai sebagian saja dari wilayah ibukota, Mogadishu.

2. Ard Al-Shumal (Somali Land)

Ard Al-Shumal dikenal dengan Somali Land atau Somalia Inggris, karena wilayah ini pernah berada di bawah kekuasaan Inggris. Somali Land terletak di sebelah Barat Daya Somalia. Ia meraih kemerdekaan dari Inggris pada 26 Juni 1960. Luas wilayah Somali Land sekitar 137.600 km2 dengan jumlah penduduk 3,5 juta jiwa. Sebelah utaranya berbatasan dengan Djibouti, Ethiopia, dan Teluk Aden. Ibu kotanya Hergeisa. Somali Land memisahkan diri dari Republik Somalia sejak tahun 1991.

Ketika presiden Somalia yang diktator bernama Siad Barre berhasil digulingkan pada 19 Januari 1991, Muhammad Ibrahim Egal mengumumkan kemerdekaan wilayah Somali Land pada 18 Mei 1991. Namun pemisahan diri secara sepihak ini tidak mendapat pengakuan internasional.

Pada tahun 2001, Somali Land menyelenggarakan referendum yang menyebabkan terpisahnya Somali Land secara mutlak dengan Republik Somalia. Pada waktu yang sama, mereka membentuk wilayah dengan nama Republik Somali Land.

Sebagai wilayah yang mengumumkan berpisah dan merdeka secara sepihak, Somali Land telah memiliki pemerintahan, parlemen, dan militer sendiri. Di antara kota penting di Somali Land adalah kota Barbarah. Di kota ini terdapat pelabuhan yang terletak di Teluk Aden. Ethiopia menggunakan pelabuhan ini sebagai jalur memasok barang impor. Keistimewaan Somali Land dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah, wilayah ini relatif aman dibanding wilayah Somalia lainnya, khususnya dengan adanya upaya terus-menerus dalam menanggalkan senjata dari milisi-milisi militer.

3. Wilayah Ogaden

Wilayah ini juga dikenal dengan Somalia Barat. Wilayah ini telah digabung menjadi bagian dari Ethiopia pada tahun 1954. Pihak Ethiopia menamakan wilayah ini dengan nama "wilayah kelima" atau wilayah Ogaden. Wilayah ini mayoritas dihuni oleh suku Arab Muslim yang memiliki dasar dari Somalia.

4. Wilayah Somalia Barat Daya

Wilayah ini dikenal dengan nama *Northern Frontier District* (NFD) atau Wilayah Perbatasan Utara. Wilayah Somalia ini hingga kini masih menjadi bagian dari wilayah Kenya. Ibu kotanya bernama Gharisa. Wilayah NFD ini telah digabungkan menjadi bagian dari Kenya sejak tahun 1963, setelah penandatanganan perjanjian Oresya. Sebelum Kenya merdeka dari penjajah Inggris, seluruh partai di wilayah NFD ini sepakat melakukan referendum untuk menentukan sikap mereka, apakah bergabung dengan Kenya atau kembali bergabung dengan Somalia. Hasilnya, rakyat NFD lebih memilih bergabung

dengan Somalia, namun Inggris menghapus hasil referendum ini, sehingga sampai saat ini NFD masih menjadi bagian dari wilayah Kenya.

5. Wilayah Afar dan Isa (Djibouti)

Daerah ini dikenal dengan Somalia Perancis. Sejak kemerdekaannya dari Perancis pada tahun 1977, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Djibouti. Afar dan Isa adalah dua suku utama di wilayah ini. Secara sejarah, bahasa, dan sistem masyarakat, Djibouti ini merupakan bagian dari Somalia. Namun secara geografis telah terpisah. Setelah wilayah ini merdeka, Djibouti langsung menjadi anggota Liga Arab, PBB, dan organisasi internasional lainnya.

3.1.3. *Transitional Federal Government* (TFG)

3.1.3.1.Sejarah *Transitional Federal Government* (TFG)

Transitional Federal Government (TFG) adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan sebuah pemerintah yang berfungsi di Somalia sejak akhir pemerintahan Siad Barre yang diktator jatuh pada tahun 1991. TFG dibentuk pada akhir 2004, pada awal pembentukannya TFG berada di Kenya sampai Juni 2005. Parlemen tidak bersidang di tanah Somalia sampai Februari 2006 karena alasan keamanan di Somalia.

Pada bulan Juli 2007, setelah berbulan-bulan mengalami penundaan akhirnya TFG mengadakan konferensi untuk rekonsiliasi Somalia. Para pihak yang terlibat termasuk ICU diundang pada konferensi tersebut tetapi ICU memilih untuk memboikot pertemuan tersebut. Akibatnya konferensi tersebut dianggap sebagai konferensi yang paling gagal. TFG saat ini mengatur pemerintahan

Somalia dari Mogadishu Selatan walaupun situasi keamanan di tempat tersebut tetap mengerikan.

Karena para anggota TFG dipilih melalui sebuah perundingan yang berlarut-larut dan bukan melalui pemilihan umum menyebabkan Somalia merupakan negara yang dianggap tidak demokratis, namun pada akhirnya tahun 2009 Somalia dijadwalkan untuk memberikan suara dalam pemilu pertama.

3.1.3.2.Pembagian Kekuasaan Pemerintahan di Somalia

TFG mencoba untuk memberikan representasi yang adil untuk masing-masing klan Somalia melalui formula apa yang disebut "4.5." Keempat utama klan yaitu Darod, Hawiya, Dir, dan Digil-Mirifle semua telah menerima enam puluh satu parlemen kursi, sedangkan kelompok yang tersisa menerima tiga puluh satu kursi. Meskipun upaya ini dilakukan secara adil dan seimbang tetapi tetap saja ada kelompok-kelompok yang merasa tidak mendapatkan bagian wajar (sumber:http://www.cfr.org/publication/12475/somalias_transitional_government.html - diakses pada 15 Juni 2010).

Di tahun 2007 Abdullahi Yusuf membentuk sebuah kabinet. Yusuf memilih individu-individu dari marga yang berbeda yang pandangannya sama-sama pro terhadap Ethiopia. Yusuf memilih Ali Mohammed Gedi sebagai Perdana Mentri yang berasal dari klan Hawiya. Klan Hawiya merupakan klan yang pada umumnya menentang pengaruh Ethiopia. Pada bulan Oktober 2007, setelah mendapat tekanan yang kuat dari pemerintah Amerika Serikat dan Ethiopia, Gedi mundur dari jabatannya, dengan alasan perbedaan pendapat dengan presiden.

Politik Somalia berdasarkan pada pembagian kekuasaan atas klan telah membuat banyak warga Somalia kecewa terhadap TFG. TFG saat ini dibagi menjadi tiga sayap: satu dipimpin oleh presiden, yang kedua oleh perdana menteri, dan yang ketiga oleh individu-individu yang mengendalikan angkatan bersenjata.

Abdullahi Yusuf seorang Presiden Somalia telah puluhan tahun memiliki pengalaman di bidang politik. Sebelum menjabat presiden, Yusuf menjabat sebagai presiden wilayah Puntland di Somalia utara di mana banyak anggota klan Darod berada. Yusuf menjabat sebagai komandan militer di tahun 1960-an. Setelah menolak untuk berpartisipasi dalam kudeta tahun 1969, Yusuf gagal memimpin usaha untuk menggulingkan diktator Somalia pada tahun 1978 dan melarikan diri ke Kenya.

Pada 1980-an, Yusuf menghabiskan waktu di penjara Ethiopia, tetapi ketika rezim negara itu yang didukung Soviet jatuh pada tahun 1991, ia mendirikan ikatan yang kuat dengan para pemimpin di Addis Ababa. Yusuf telah lama berdebat dengan Syeikh Hassan Dahir Aweys, salah satu pemimpin milisi Islamis atas Somalia dan mantan kepala kelompok teroris anti-Ethiopia al-Itihaad al-Islaami. Yusuf meninggalkan sementara Somalia untuk perawatan medis di awal 2008, dan masalah kesehatan telah mempengaruhi kemampuannya untuk memerintah.

Adde Nur Hassan Hussein mantan kepala polisi dan jaksa agung di Somalia dipilih untuk menggantikan Gedi sebagai perdana menteri pada tanggal 22 November 2007. Hussein adalah anggota subklan Mudulook dari Abgal, yang

merupakan bagian dari klan Hawiya yang mendominasi Mogadishu. Ia juga kepala masyarakat Bulan Sabit Merah Somalia yang merupakan sebuah organisasi kemanusiaan.

Mohammed Dheere merupakan Walikota Mogadishu sejak Mei 2007, Dheere memiliki kekuatan bersenjata sendiri. Dari tahun 2001 sampai 2006 Dheere adalah panglima perang dari Jowhar, kota perdagangan utara Mogadishu. Pada tahun 2006, Dheere bergabung *dengan Alliance for Restoration of Peace and Counter Terrorism* (ARPCT), sebuah koalisi yang didukung oleh *Central Intelligence Agency* (CIA) untuk menentang penyebaran Islam. Dheere adalah anggota subklan Abgal marga Hawiya.

3.1.4. *Islamic Court Union* (ICU)

3.1.4.1.Sejarah *Islamic Court Union* (ICU)

Islamic Court Union (ICU) atau Uni Pengadilan Islam adalah kelompok yang menyatukan diri untuk membentuk pemerintahan saingan TFG dengan Syeikh Sharif Ahmed sebagai kepala ICU. Mereka juga dikenal dengan nama lain sebagai Pengadilan Islam Bersama, Persatuan Pengadilan Islam, Dewan Tertinggi Pengadilan Islam. Amerika Serikat sering menyebut kelompok tersebut sebagai Somalia Islamis.

Setelah jatuhnya pemerintah Somalia pada tahun 1991, sebuah sistem berdasarkan syariah Islam menjadi sistem yang diperjuangkan oleh ICU. ICU mulai menawarkan pelayanan-pelayanan lain seperti pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. ICU juga bertindak sebagai pasukan kepolisian setempat, yang dibiayai

oleh para pengusaha setempat, untuk mengurangi kejahatan. Penduduk Somalia hampir seluruhnya Muslim, dan lembaga-lembaga ini mulanya mendapat dukungan luas dari masyarakat.

3.1.4.2.Keberhasilan *Islamic Court Union* (ICU)

ICU telah banyak mengambil alih kontrol terhadap wilayah Somalia, hal tersebut dicapai atas keberhasilan ICU dalam mengambil alih wilayah-wilayah penting di Somalia. Keberhasilan tersebut antara lain :

- Pada tanggal 6 Juni 2006, ICU mengklaim memegang kendali atas semua tanah yang hingga 100 kilometer (62 mil) dari pedalaman Mogadishu. Para Panglima dari Somalia telah ditangkap atau mengungsi dari kota Mogadishu, meninggalkan sebagian besar senjata mereka, dan mayoritas lari ke Jowhar. Hal ini menyebabkan ICU mengendalikan banyak persenjataan di negara ini.
- ICU juga mengontrol wilayah yang signifikan di luar ibukota, termasuk kota penting yaitu Balad. Pada pertengahan Agustus, milisi ICU menyapu ke kota pelabuhan Hobyo, 500 kilometer sebelah utara Mogadishu. ICU ini mengadakan kampanye untuk jalan-jalan di Mogadishu pada tanggal 20 Juli.
- Pada tanggal 15 Juli 2006, ICU kembali membuka Bandar Udara Internasional Mogadishu yang telah ditutup sejak penarikan pasukan internasional pada tahun 1995. Pesawat pertama disewa oleh Liga Arab

yang terbang dari bandara untuk pertama kalinya dalam 11 tahun untuk membawa delegasi ICU ke Khartoum ibukota Sudan.

- Pada tanggal 15 Agustus 2006, ICU menguasai Harardhere, sekitar 500 km timur laut Mogadishu, yang menjadi tempat aman untuk bajak laut yang telah memaksa perusahaan pelayaran dan organisasi internasional untuk membayar uang tebusan yang besar untuk membebaskan kapal dan kru yang ditawan oleh tentara ICU.
- Pada tanggal 25 Agustus 2006, ICU telah melakukan hal bersejarah dengan membuka kembali pelabuhan Mogadishu, yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Afrika Timur, yang telah ditutup untuk 10 tahun terakhir.
- Pada bulan September 2006, ICU memperkuat kontrol mereka terhadap Kismayo.
- Pada tanggal 5 Oktober 2006, ICU menyatakan pembentukan pengadilan Syariah Islam agung provinsi Banadir.

Sampai akhir tahun 2006 ICU menguasai sebagian besar Somalia selatan termasuk sebagian kota-kota besar seperti Jowhar, Kismayo, Beledweyne, dan ibukota Somalia yaitu Mogadishu. Pada bulan Desember 2006, ICU kehilangan banyak wilayah setelah kekalahan pada pertempuran Baidoa, Bandiradley, dan Beledweyne, kemudian ICU mundur ke Mogadishu.

3.2. Kondisi Konflik Bersenjata Antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU) yang Terjadi di Somalia

3.2.1. Sejarah Konflik di Somalia

Jauh sebelum terjadinya konflik yang terjadi antara TFG dan ICU pertentangan telah muncul semenjak Somalia mendapatkan kemerdekaannya. Adanya perebutan wilayah dan perebutan kekuasaan menjadi dasar terjadinya konflik yang terus-menerus berkembang sampai saat ini.

Pada awalnya Somalia mejadi terpisah-pisah semenjak dijajah oleh Inggris dan Italia pada zaman kolonisasi pada tahun 1960 dan sebuah keputusan dibuat untuk menciptakan suatu negara yang bersatu. Pada saat kemerdekaan Somalia pada pertama kalinya, tidak hanya penting untuk menyatukan bagian wilayah Somalia bekas jajahan Inggris dan bagian wilayah Somalia bekas jajahan Italia, tetapi juga Somali Land Perancis (sekarang disebut dengan Djibouti), serta wilayah Ogaden yang dinyatakan sebagai bagian dari Ethiopia yang di klaim oleh Somalia. Dalam upaya menyatukan Somalia yang lebih besar maka Somalia meminta bantuan kepada Uni Soviet untuk melawan Ethiopia yang didukung oleh Barat.

Pada tahun-tahun setelah kemerdekaannya sebuah upaya dilakukan untuk membuat sebuah pemerintahan yang demokrasi di Somalia. Banyaknya campur tangan dari faksi politik yang berdasarkan pada klan menghambat usaha tersebut dan akhirnya kemudian pada tahun 1969 Panglima Mohammed Siad Barre berkuasa secara otoriter di Somalia. Barre menerapkan sistem satu partai yaitu

sosialis yang didukung oleh Uni Sovyet baik segi finansial maupun militer. Selain itu Barre mempunyai kebijakan yang bertujuan untuk menghapuskan *clanism*.

Pada pertengahan dan akhir tahun 1970 lingkungan politik berubah dan Uni Soviet memberikan dukungannya terhadap Ethiopia dan pada gilirannya Somalia mulai mencari dukungan terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat mendukung secara ekonomi namun tidak memberikan bantuan militer sebagaimana yang Siad Barre inginkan.

Sebuah usaha gagal dilakukan untuk mendukung pemberontakan di wilayah Ogaden hal tersebut disebabkan bahwa Uni Soviet lebih membantu Ethiopia dibandingkan Somalia, hal tersebut mengakibatkan ratusan ribu pengungsi dari Ogaden melintasi perbatasan ke Somalia.

Peristiwa-peristiwa tersebut bersamaan dengan terpuruknya keadaan ekonomi dan kediktatoran yang dimiliki oleh Siad Barre mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Somalia. Pada tahun 1978 sejumlah perwira mencoba melakukan kudeta tetapi gagal. Sebagai respon dari percobaan kudeta tersebut rezim Siad Barre menggunakan kekerasan terhadap klan yang sebagian besar dipimpin oleh para perwira tersebut. Dengan adanya kekerasan tersebut menimbulkan kebangkitan kelompok oposisi yang berbasis klan. Berbagai milisi mulai dibentuk dan hal tersebut merupakan awal dari berlarut-larutnya konflik yang terjadi di Somalia.

Pada tahun 1991 akhirnya Siad Barre berhasil digulingkan oleh *United Somali Congress* (USC) yang dipimpin oleh Ali Mahdi. Tergulingnya Siad Barre menyebabkan runtuhnya pusat pemerintahan dan meningkatnya konflik antar

faksi. Pemerintahan yang baru dipimpin oleh Mahdi hanya mengontrol sebagian dari wilayah Mogadishu semenjak kelompok lainnya serta USC pecah dan bagian lain dari USC dipimpin oleh Mohammad Farrah Aided tidak menerima pemerintahan yang terbentuk dan pertempuran terus berlangsung.

Pada Mei 1991 *Somali National Movement* (SNA) atau Gerakan Nasional Somalia memproklamasikan wilayah bekas jajahan Inggris dengan nama Republik Somali Land Merdeka, meskipun belum diakui secara internasional. Sejak 1991 Somalia tidak memiliki pemerintahan pusat yang efektif dan mengalami konflik secara terus-menerus antar klan yang berbeda untuk mendapatkan kekuasaan.

Berbagai inisiatif untuk perdamaian telah dilakukan selama 19 tahun terakhir, termasuk beberapa konferensi perdamaian yang didukung oleh masyarakat internasional, tetapi konfrontasi dan kekerasan masih terus terjadi. Perjanjian perdamaian yang dihasilkan oleh pemerintahan yang baru telah dicapai sejak tahun 1991 tetapi perjanjian tersebut tidak pernah berhasil dilaksanakan.

Pada tahun 1992 PBB memberlakukan embargo senjata dengan tujuan mendirikan perdamaian dan stabilitas di Somalia. Kemudian masih pada tahun yang sama sebuah mediasi untuk mencapai perjanjian mengenai gencatan senjata sebuah operasi PBB dikerahkan di Somalia yaitu *United Nation Operation In Somalia* (UNOSOM) untuk mengawasi perjanjian dan melindungi bantuan kemanusiaan karena kondisi kelaparan yang parah terjadi di Somalia. Kehadiran operasi perdamaian PBB ditentang oleh faksi Aideed dari USC.

Dalam upaya untuk meningkatkan keamanan sebuah pasukan multinasional dari 37.000 prajurit bernama *Unified Task Force* (UNITAF) yang

dipimpin oleh Amerika Serikat melalui sebuah operasi bernama "Operasi Pemulihan Harapan" yang kemudian disahkan oleh Dewan Keamanan PBB (sumber: http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unosomi.htm - diakses pada 7 juli 2010)

Pada bulan maret 1993 perjanjian damai ditandatangani antara Aideed dan Mahdi bersama dengan pihak yang bertikai lainnya dimana Dewan Transisi Nasional disepakati, selanjutnya UNITAF berubah menjadi UNOSOM II.

Namun demikian serangan terhadap operasi PBB terus berlanjut, dalam upaya untuk menangkap Aideed ratusan warga Somalia dan tentara Amerika tewas. Foto-foto tentara Amerika Serikat disiksa di Mogadishu disiarkan di seluruh dunia dan pada akhirnya menyebabkan penarikan tentara Amerika Serikat dari Somalia. Misi PBB meninggalkan Somalia pada bulan Maret 1995, dan juga meninggalkan *United Nation Political Office for Somalia* (UNPOS) yang berbasis di Nairobi dengan alasan keamanan.

Aideed meninggal pada tahun 1996 dan digantikan oleh putranya yaitu Hussein Aideed. Ini membuka sebuah kesempatan untuk bernegosiasi tetapi konflik baru pecah kembali pada akhir tahun tersebut. Akibat dari konflik tersebut tidak ada kelompok yang berhasil menguasai negara dari tahun 1997 sampai 2000 dan Somalia tidak mempunyai pemerintahan yang sah.

Pada tahun 2000 sebuah konferensi perdamaian dilaksanakan untuk membentuk Pemerintahan Somalia yang diprakarsai oleh Djiibouti dan *Intergovernmental Authority for Development* (IGAD). Konferensi tersebut

menghasilkan pembentukan *Transitional National Assembly* (TNA) dan *Transitional National Government* (TNG) yang diberi mandat selama tiga tahun.

Pemerintahan yang baru telah terbentuk namun tidak pernah berhasil memperluas kekuasaannya ke luar Mogadishu serta menghadapi beberapa oposisi yang dipimpin oleh para panglima perang dan kelompok lainnya yang menolak perjanjian damai. Perlawanan terhadap pemerintahan terus berlangsung dengan membentuk sebuah aliansi militer yaitu *Somali Reconciliation and Restoration Council* (SRRC) pada tahun 2001 dengan tujuan untuk menggulingkan TNG.

Pada 2001 IGAD mencoba kembali merundingkan solusi untuk konflik yang terjadi di Somalia. Negosiasi berlangsung sampai dengan 2004 dan menghasilkan pendirian dari *Transitional Federal Government* (TFG) dan karena mandat dari TNG telah berakhir pada tahun 2003.

3.2.2. Keterlibatan Ethiopia Dalam Konflik yang Terjadi di Somalia

Intervensi yang dilakukan oleh Etiophia dalam konflik yang terjadi di Somalia merupakan permintaan dari TFG yang dimulai pada Desember 2006, namun dalam faktanya keterlibatan Ethiopia dalam konflik yang terjadi di Somalia memiliki sejarah yang cukup panjang.

Somalia dan Ethiopia bersaing karena adanya perbedaan dari etnis dan agama dalam sejarah hubungan kedua negara tersebut. Ketika kekuatan Eropa hilang, Afrika terbagi-bagi setelah lepasnya negara-negara di Afrika dari penjajahan, Ethiopia diberi bagian dari wilayah Ogaden yang diklaim oleh Somalia. Inggris menyerahkan wilayah tersebut yang bagi Somalia wilayah

tersebut merupakan wilayah bagian dari Somalia. Perang akhirnya terjadi akibat dari perebutan wilayah tersebut.

Pada tahun 1964 dan 1977 Somalia dan Ethiopia telah mendukung kelompok pemberontakan di wilayah lainnya. Seperti contohnya Ethiopia berperan aktif dalam menciptakan *Reconciliation and Restoration Council* (SRRC) dalam upaya menggulingkan pemerintahan Somalia. Pada tahun 2004 sampai dengan terbentuk TFG diduga kuat merupakan hasil dari keinginan Ethiopia yang meyakini bahwa pemerintahan Somalia yang lemah akan mencegah Somalia dari pengklaiman wilayah Ogaden.

Wilayah Ogaden menjadi rebutan karena pada zaman kolonialisasi saat negara-negara Eropa dengan kekuasaan mereka membagi-bagi dan menetapkan garis perbatasan antar negara satu dengan negara lainnya tidak mempertimbangkan aspek-aspek sosio-kultural tapi lebih pada aspek geografis, sehingga terdapat satu etnik terpisah dalam dua wilayah negara. Konflik perebutan Ogaden ini terjadi akibat warisan kolonial Perancis yang membagi-bagi wilayah koloninya sehingga menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Ogaden yang berada di bawah kepemerintahan Ethiopia, dimana di wilayah tersebut sekitar sepertiga dari warga Somalia tinggal.

Pada saat Ethiopia mengalami kesulitan dalam konfliknya dengan Eritrea, Siad Barre menerjunkan pasukannya untuk membantu pemberontak Somalia di Ogaden. Konflik dengan Ethiopia ini didasari atas latar belakang demografis, dimana 90 % penduduk Somalia merupakan Islam sedangkan Ethiopia beragama Kristen.

Pada saat perang sedang berlangsung Soviet mengalihkan dukungannya justru pada rezim Marxist Ethiopia. Siad meminta Soviet untuk menambahkan bantuan terhadap Somalia, namun ditolak oleh Soviet. Karena itu Siad membatalkan perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Uni Soviet, bahkan mengusir para penasihat Uni Soviet dari Somalia. Dalam perang ini kemudian berbalik menjadi kekalahan Somalia akhirnya Somalia menarik diri dari Ogaden. Dalam rangka memutuskan hubungan dengan para pemberontak, pada tahun 1988 Barre mengadakan kesepakatan dengan pihak Ethiopia untuk saling menghentikan dukungan bagi para pemberontak di kedua negara.

Pada Desember 2006 Invasi dari Ethiopia dilakukan atas permintaan dari TFG dan dengan dukungan dari Amerika Serikat. Pada akhir 2006, kelompok Islamis ini berhasil mengalahkan pemerintah transisi yang dituding sebagai boneka Ethiopia dan merebut hampir semua kota penting, termasuk Ibukota Mogadishu. Kekalahan inilah yang mendorong militer Ethiopia secara terang-terangan menyerang wilayah Somalia. Adanya ketakutan dari Ethiopia bahwa ICU yang berlandaskan Islam akan berpengaruh luas terhadap negara-negara tetangganya karena Ethiopia berpenduduk Kristen dan tidak ingin bahwa Islam mendominasi benua Afrika jika ICU dibiarkan terus berkembang.

Ethiopia menyatakan keinginannya untuk menarik diri setelah kekalahan ICU dan telah menyatakan bahwa akan mundur segera setelah operasi perdamaian datang dan bisa menstabilkan situasi di Somalia. Situasi keamanan yang lambat dari penyebaran misi AMISOM di Somalia telah mencegah penarikan pasukan Ethiopia dengan alasan karena tidak adanya kekuatan yang layak untuk

mempertahankan TFG dari pemberontakan yang terjadi. Bahkan PBB sediri telah menyatakan bahwa penguatan AMISOM diperlukan untuk memfasilitasi penarikan Ethiopia dari Somalia.

Sejak AMISOM dikerahkan setelah campur tangan Ethiopia dalam konflik adanya kekhawatiran dari ICU bahwa AMISOM dilihat terlalu dekat dengan kepentingan Ethiopia sehingga dipertanyakan kenetralitasan dari AMISOM karena dalam mandat yang diberikan kepada AMISOM jelas ditegaskan bahwa operasi yang dilakukan oleh AMISOM harus mendukung dan melindungi TFG dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.3. Kondisi Konflik Antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU)

TFG memiliki mandat lima tahun untuk mempersiapkan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2009. Karena masalah keamanan TFG memulai tugasnya di Kenya, tetapi kemudian pindah ke Jahwar dan kemudian pindah lagi ke Baidoa pada tahun 2006. TFG dipimpin oleh Abdullahi Yusuf yang sebelumnya pernah menguasai wilayah otonomi Punt Land Somalia dengan dukungan militer dan keuangan dari Ethiopia. Ethiopia mendukung TFG dan penunjukan atas kepemimpinan Yusuf dengan harapan Yusuf akan menghentikan klaim negaranya terhadap wilayah Ogaden.

Sementara itu jaringan dari pengadilan Islam lokal telah mengorganisir diri atas nama *Islamic Court Union* (ICU). ICU didirikan sebagai bentuk penentangan terhadap TFG. Selain menjalankan sebuah pengadilan, ICU juga telah

membangun sebuah sekolah dan pusat kesehatan. Hal tersebut membuat ICU mendapatkan dukungan dari masyarakat Somalia.

Pada akhir 2004 Yusuf meminta agar pasukan penjaga perdamaian dikirim ke Somalia untuk mencegah destabilisasi negara tersebut. Pada bulan Januari 2005 IGAD memutuskan untuk menyebarkan misi perdamaian ke Somalia yaitu IGASOM. Uni Afrika mendukung misi pada bulan berikutnya, namun sampai saat ini pun misi tersebut tidak terlaksana.

ICU mulai berkembang pesat pada tahun 2006. Pada bulan Juni 2006 ICU telah mengontrol atas Mogadishu dan sekitarnya. TFG menuduh bahwa ICU memiliki keterkaitan dengan teroris internasional. Tahun 2006 perundingan damai dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik antar TFG dan ICU yang disebut dengan negosiasi Khartoum yang dipimpin oleh Liga Arab beserta Amerika, namun pertempuran antara pemerintah dan ICU terus berlangsung pada tahun 2006 sampai pada akhirnya ICU menguasai sebagian besar wilayah Somalia.

TFG meminta bantuan dari Ethiopia untuk melawan ICU. Pada bulan Desember 2006 Ethiopia turut campur terhadap konflik yang terjadi di Somalia dengan dukungan dari Amerika untuk menjatuhkan ICU. Pasukan TFG dengan dukungan dari militer Ethiopia telah mendorong ICU kembali ke Mogadishu. Namun kehadiran Ethiopia telah menghasut timbulnya pemberontakan baru dan situasi berubah di luar kontrol, tetapi TFG meminta agar pasukan Ethiopia tetap berada di Somalia karena khawatir ICU kembali menguasai Somalia seperti sebelum adanya intervensi dari Ethiopia. Ethiopia akhirnya sepakat hanya akan menarik diri setelah adanya misi perdamaian multinasional datang ke Somalia.

Pada bulan Januari 2007 AU mengerahkan *An African Union Mission in Somalia* (AMISOM) dengan keinginan dari Uni Afrika bahwa misi itu akan diambil alih oleh PBB dalam mandat pertama selama 6 bulan. Pertempuran antara TFG dan ICU meledak kembali dan Amerika Serikat menuduh ICU bekerjasama dengan Al-Qaeda. AMISOM akhirnya dikerahkan ke Somalia meskipun dengan kapasitas pasukan yang jauh tidak memadai dari kapasitas awal yang direncanakan.

Pasukan Ethiopia masih tetap berada di Somalia dan situasi keamanan yang masih tetap buruk membuat PBB enggan untuk mengirimkan operasi perdamaian PBB. Aliansi antara Ethiopia, Amerika Serikat, dan TFG dalam melawan ICU dan adanya dukungan internasional tetapi pemerintahan Somalia yang rapuh dan selalu bergantung pada kekuatan asing dan terus lahirnya pemberontakan anti pemerintah merupakan penyebab utama dari terus berlarut-larutnya konflik yang terjadi di Somalia.

Pada Desember 2006, pasukan TFG dengan didukung tentara Ethiopia dan negara Barat, menyerang basis-basis ICU. Serangan ini membuat ICU terdesak dari Mogadishu sebelum kehilangan seluruh wilayah. Mereka selanjutnya bergerilya. Pertikaian panjang tidak bisa lagi dihindari. PBB mengirimkan pasukan perdamaian untuk meredam konflik. Meski begitu, para pejuang Islam berikrar untuk terus melawan pemerintah dukungan Barat, mengusir tentara asing, sekaligus mengembalikan penerapan syariat Islam di seluruh wilayah Somalia.

Syariat Islam yang diusung ICU telah menjadi anutan oleh warga Somalia. Masyarakat menilai saat hukum Islam dijalankan dapat menciptakan kondisi yang aman. Stabilitas terwujud, juga tidak muncul kekhawatiran terhadap tindak kejahatan dan peredaran narkoba. Masyarakat Somalia cenderung memilih syariat Islam karena merasa kecewa dengan sistem demokrasi ala Barat. Dalam pandangan masyarakat Somalia sistem politik modern yang diadopsi pemerintah justru melanggengkan praktik korupsi, nepotisme, dan tata kelola yang buruk.

Di akhir bulan Desember 2006, Jendral John Abizaid sebagai komandan Pusat Komando militer Amerika Serikat mengunjungi ibukota Ethiopia yaitu Addis Ababa untuk menyetujui rencana invasi Presiden Ethiopia, Meles Zenawai, terhadap tetangganya Somalia. Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Ethiopia. Tidak hanya memberikan dukungan, Pemerintahan Amerika Serikat pun memberikan bantuan militer, dan operasi intel terhadap ICU dan keberadaan penasihat militer.

Alasan Amerika Serikat dalam mendukung invasi Ethiopia adalah perlindungan pemerintahan dan menuduh ICU merupakan tersangka pengeboman Kedutaan Besar Amerika di Kenya dan Tanzania di tahun 1998. Serangan terhadap dua kedutaan tersebut menewaskan banyak warga Amerika. Maka hal utama yang mendasari agresi Ethiopia dan Amerika Serikat ada dua yaitu :

1. ICU memiliki hubungan dengan teroris yang membom Kedutaan Besar Amerika Serikat dan akan mengganggu keamanan regional apabila dibiarkan berkeliaran.

2. TFG adalah pemerintahan yang sah dan didukung oleh mayoritas penduduk Somalia.

Invasi Ethiopia terhadap Somalia untuk menumbangkan ICU menjadi titik puncak ketegangan di Somalia. Setelah berbulan-bulan mengelak keberadaan pasukannya di wilayah Somalia, rezim Ethiopia melakukan penyerangan terhadap ICU yang telah mundur dari Mogadishu, ibukota Somalia di akhir Desember 2006. Pemerintah Ethiopia mengatakan bahwa ia bertindak sebagai dukungan terhadap TFG, yang berpusat di kota Baidoa yang terletak sekitar 90 kilometer bagian utara Mogadishu.

Pendudukan tentara Ethiopia mendapatkan dukungan luas dari masyarakat internasional, karena dilakukan sebagai dukungan terhadap pemerintahan yang sah di Somalia yaitu TFG dalam menghadapi ICU. Amerika Serikat memberikan dukungan penuh kepada Ethiopia termasuk bantuan militer, dan operasi intel serta keberadaan penasihat militer.

Sebaliknya, Islam garis keras memecah barisan dari ICU dan membentuk kelompok-kelompok militan lain, seperti Al-Shabaab dan Hizbul Islam untuk melanjutkan perang melawan pemerintah.

3.3. Uni Afrika

Uni Afrika (UA) dibentuk pada tahun 2002 yang merupakan sisa-sisa dari *Organization African Union* (OAU) atau Organisasi Kesatuan Afrika. Meskipun Uni Afrika masih berjuang untuk mereformasi badan-badan yang dimilikinya, Uni Afrika memainkan peran yang semakin tinggi dalam bidang perdamaian. Akhir-

akhir ini, Uni Afrika telah mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Somalia dan Darfur dalam operasi penjaga perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Uni Afrika sendiri adalah sebuah organisasi antar-pemerintah yang bertujuan menyebarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pembangunan di penjuru Afrika, mempercepat integrasi politik dan sosial-ekonomi, memajukan dan mempertahankan posisi Afrika secara bersama dalam masalah-masalah kepentingan terhadap rakyat Afrika, serta perdamaian dan keamanan di Afrika.

Uni Afrika merupakan penerus Organisasi Persatuan Afrika (OAU). Ketua UA pertama ialah Thabo Mbeki, Presiden Afrika Selatan. Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia.

3.3.1. Latar Belakang Uni Afrika

Uni Afrika memiliki sejarah yang cukup panjang. Uni Afrika adalah sebuah entitas yang terus bekerja untuk mewujudkan integrasi di benua Afrika yang memungkinkan Uni Afrika untuk berperan dalam perekonomian global maupun untuk menangani masalah dalam segi sosial, ekonomi, dan masalah politik.

Pada tahun 2002, OAU berubah menjadi Uni Afrika. OAU didirikan pada tahun 1963 yang berpegangan pada prinsip-prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi, OAU mendapatkan kritik sepanjang tahun 1990 karena kurangnya penanganan yang berlangsung di Rwanda, Republik Demokratik Kongo, dan

Somalia. Karena ketidakefektifan yang dimiliki oleh OAU maka para pemimpin di Afrika yang dipelopori oleh pemimpin Libya yaitu Muammar el-Qaddafi untuk memulai Uni Afrika, sebuah organisasi dengan struktur yang mengikuti model Uni Eropa. Lima puluh tiga negara di Afrika adalah anggota Uni Afrika (Maroko adalah satu-satunya negara Afrika yang tidak termasuk menjadi anggota Uni Afrika), Uni Afrika bermarkas di Addis Ababa, Ethiopia.

Pada awalnya OAU didirikan untuk memastikan bahwa semua negara-negara di benua Afrika dapat menikmati Hak Asasi Manusia, meningkatkan standar hidup di seluruh Afrika, dan juga dapat menyelesaikan perselisihan antar negara anggota yang tercantum dalam Piagam Organisasi Persatuan Afrika yang diterapkan pada tahun 1963 di Addis Ababa Ethiopia. Afrika berkomitmen untuk bekerjasama dalam mengkoordinasikan dan mengintensifkan dengan upaya untuk mencapai kehidupan yang baik bagi masyarakat Afrika.

Bagi negara-negara anggotanya OAU dianggap sebagai wadah untuk forum diskusi. OAU berusaha untuk menegakkan perdamaian tetapi kurangnya sumber daya manusia menyebabkan sulitnya untuk campur tangan dalam perang sipil maupun perjuangan untuk melawan kolonialisme. Kebijakan non intervensi dalam urusan negara-negara anggota juga dibatasi OAU dalam mencapai tujuannya.

Kesepakatan sulit dicapai dalam tubuh OAU. Koloni Prancis yang pro pada kapitalis dan pro pada faksi sosialis selama perang dingin berlangsung yang menyebabkan masing-masing negara memiliki agenda masing-masing dan sulit untuk mencapai suatu kesepakatan.

Akhirnya pada tahun 1999 Sidang Luar Biasa Sirte memutuskan untuk mendirikan Uni Afrika. Deklarasi untuk mendirikan Uni Afrika diikuti oleh UU Konstitutif Uni Afrika pada tahun 2000. Pada pertemuan tingkat tinggi Lusaka setahun kemudian menggambarkan peta jalan untuk pelaksanaan Uni Afrika. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan Uni Afrika pertama kali diresmikan oleh presiden pertamanya yaitu Thabo Mbeki. Uni Afrika dibentuk dengan harapan meningkatkan tujuannya untuk mengamankan Afrika dengan menerapkan demokrasi, Hak Asasi Manusia, kesejahteraan ekonomi, dan tentunya berakhirnya konflik yang banyak melanda di negara-negara Afrika.

Majelis Uni Afrika merupakan badan pembuat keputusan dalam Uni Afrika yang tediri dari kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara anggota. Uni Afrika juga mempunyai beberapa badan resmi yang memiliki peranan penting dalam mengatasi isu-isu kritis seperti Dewan Eksekutif, Dewan Keamanan dan Perdamaian, *Economic Social and Cultural Council* (ECOSOC) atau Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya, Komite Teknisi Spesial, Lembaga Hak Asasi Manusia. Semua badan tersebut memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah-masalah yang mendesak.

3.3.2. Tujuan Uni Afrika

Uni Afrika berusaha untuk meningkatkan pembangunan, memerangi kemiskinan dan korupsi, dan mengakhiri terjadinya konflik yang banyak terjadi di negara-negara kawasan Afrika. Uni Afrika adalah organisasi regional yang memegang prinsip non-intervensi dalam negara anggota karena alasan hak asasi

manusia dan kemanusiaan, prinsip yang dimiliki oleh Uni Afrika mengenai non-intervensi menegaskan bahwa negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara mereka sendiri dari bencana yang tidak dapat dihindari, seperti dari pembunuhan massal dan perkosaan, dan juga dari kelaparan. Tetapi ketika suatu negara tersebut tidak mau atau tidak mampu melakukannya, maka tanggung jawab dari Uni Afrika untuk ikut campur dalam masalah tersebut.

Pada kenyataannya pelaksanaan dari Uni Afrika tentang tujuan-tujuan baru masih tetap merupakan sebuah aspirasi dan masih belum terealisasi. Mereformasi OAU adalah tugas yang monumental terutama karena banyak negara-negara anggota dari Uni Afrika memiliki masalah dengan kemiskinan dan juga masalah-masalah domestik terutama masalah konflik.

Tetapi badan-badan yang berada dalam tubuh Uni Afrika selama bertahun-tahun tumbuh untuk melaksanakan tugas yang tercantum dalam piagam Uni Afrika, dan banyak yang menandai awal perdamaian dengan keterlibatan Uni Afrika di negara-negara seperti Burundi dan Sudan sebagai langkah penting. Uni Afrika memang masih rapuh tapi telah mulai menghasilkan beberapa usaha dalam menjaga perdamaian di benua Afrika.

3.3.3. Keanggotaan Uni Afrika

Anggota Uni Afrika berasal dari negara-negara yang berada di benua Afrika. Uni Afrika beranggotakan 52 negara dan 1 wilayah yang belum merdeka, Sahara Barat. Maroko menolak menjadi anggota Uni Afrika karena keikutsertaan

Sahara Barat, wilayah yang diklaim Maroko. Sedangkan Somali Land tidak diikutsertakan karena kedaulatan negara itu tidak diakui dunia internasional.

Negara-negara yang termasuk ke dalam anggota Uni Afrika yaitu Aljazair, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kenya, Komoro, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania Mauritius, Mesir, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Sahara Barat, Sao Tome dan Principe, Afrika Selatan, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanjung Verde, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

3.3.4. Organ Utama Dalam Uni Afrika

Terdapat beberapa organ utama dalam Uni Afrika. Organ-organ tersebut terdiri dari :

1. Majelis

Terdiri dari kepala negara. Pertemuan dilakukan sedikitnya sekali dalam setahun dan merupakan tubuh utama dalam pengambilan keputusan di Uni Afrika. Majelis memilih seorang ketua Uni Afrika, yang memegang jabatan selama satu tahun. Pada tahun 2009 ketua Uni Afrika berasal dari Libya yaitu Muammar Qaddafi.

2. Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif terdiri dari menteri urusan luar negeri negara-negara anggota. Dewan Eksekutif bertanggung jawab kepada Majelis.

3. Komisi

Sepuluh komisaris memegang portofolio individu yang mengelola tugas harian dan melaksanakan kebijakan Uni Afrika. Komisi melaporkan kepada Dewan Eksekutif. Ketua saat ini dipegang oleh Jean Ping, mantan menteri luar negeri Gabon.

4. *The Peace and Security Council* (PSC)

The Peace and Security Council (PSC) atau Dewan Perdamaian dan Keamanan yang didirikan pada tahun 2004. Badan ini dapat campur tangan dalam konflik untuk melindungi keamanan di kawasan Afrika. Memiliki lima belas negara anggota, dipilih untuk dua atau tiga tahun, dengan hak suara yang sama. PSC juga mengawasi pembentukan pasukan keamanan Afrika, Angkatan siaga Uni Afrika. PSC berencana untuk memiliki lima atau enam brigade dari 3.000 sampai 5.000 tentara ditempatkan di sekitar Afrika pada tahun 2010.

5. Parlemen Pan-Afrika

Parlemen Pan-Afrika mulai tahun 2004 dibentuk untuk "memastikan partisipasi penuh dari masyarakat Afrika dalam pemerintahan, pembangunan, dan integrasi ekonomi Benua Afrika". Pada saat ini Parlemen Pan-Afrika memiliki kekuasaan menjadi penasihat saja, tetapi ada rencana untuk memberikan hal kekuasaan legislatif di masa depan.

6. *The Economic, Social and Cultural Council* (ECOSOCC)

The Economic, Social and Cultural Council (ECOSOCC) atau Dewan Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan. Didirikan pada tahun 2005, ECOSOCC berupaya membangun kemitraan antara pemerintah Afrika dan masyarakat sipil. Hal ini termasuk kelompok sosial Afrika, kelompok profesional, LSM, dan organisasi kebudayaan.

7. Mahkamah Kehakiman

Pada tahun 2004, Uni Afrika setuju bahwa Mahkamah Manusia dan Hak Masyarakat Afrika akan bergabung dengan Mahkamah Kehakiman. Pada Agustus 2009, penggabungan kedua pengadilan masih dalam proses.

8. Lembaga Keuangan

Terdapat tiga badan yaitu Bank Sentral Afrika, Dana Moneter Afrika, dan Bank Investasi Afrika. Dari jumlah tersebut, hanya Bank Investasi Afrika yang telah ditetapkan, tetapi belum berfungsi secara baik. Terdapat di Tripoli, Libya (sumber: http://www.sarpn.org.za/documents/d0001227/P1359-kajee_April2005.pdf - diakses pada 20 Juni 2010)

New Partnership for Africa's Development **(NE**PAD) telah dikembangkan oleh lima negara bagian awal dari OAU yaitu Aljazair, Mesir, Nigeria, Senegal, dan Afrika Selatan. Secara resmi diadopsi pada bulan Juli 2001. Tujuan utama dari NEPAD adalah penanggulangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan mengintegrasikan Afrika ke dalam ekonomi global. NEPAD berfokus pada membangun kemitraan dengan negara-negara industri untuk

meningkatkan bantuan, investasi asing, penghapusan utang, dan akses pasar. Pada tahun 2002, NEPAD ditempatkan di bawah lingkup Uni Afrika; komite laporan tahunan kepada Majelis Uni Afrika. Pada bulan Maret 2007, pemimpin NEPAD memutuskan kemitraan tersebut harus diintegrasikan ke dalam struktur dan proses dari Uni Afrika.

3.3.5. Hambatan Uni Afrika

Uni Afrika mengalami hambatan yang luar biasa terutama dalam masalah finansial. Butuh waktu bertahun-tahun untuk lembaga-lembaga regional yang sama di Eropa, Asia, dan Amerika Latin untuk membentuk suatu organisasi, dan Uni Afrika menghadapi tantangan tambahan berupa kemiskinan dan konflik yang dialami oleh negara-negara anggotanya.

Selain itu, Uni Afrika bergantung pada komunitas ekonomi regional yang juga lemah. Tidak ada satu pun dari negara-negara anggota Uni Afrika benar-benar dapat memberikan kontribusi secara finansial. Pada tahun 2006 dalam *Banjul Summit*, hanya dua belas negara telah membayar kontribusi mereka.

Reformasi Uni Afrika dan penyebaran penjaga perdamaian pun tergantung pada kehendak pemimpin yang kuat, yaitu Muammar Qaddafi dari Libya dan Jacob Zuma yang merupakan Presiden Afrika Selatan. Zimbabwe sebagai sebuah contoh negara yang telah gagal dibantu oleh Uni Afrika.

3.3.6. Sumber Dana Uni Afrika

Pada bulan Agustus 2006, Amerika Serikat menjadi negara non-Afrika pertama yang mendirikan misi diplomatik untuk Uni Afrika. Duta Besar Amerika Serikat untuk Uni Afrika yaitu Michael Battle berjanji akan mendukung upaya Uni Afrika untuk memajukan demokrasi dan kebebasan pers, memperkuat sistem pemilu, mempromosikan perdamaian dan keamanan, untuk "menginternalisasi" nilai-nilai universal hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, dan supremasi hukum.

Dari bantuan total Amerika Serikat ke Afrika pada tahun 2008 sekitar $ 5.200.000.000, tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk Uni Afrika, melainkan dana disalurkan untuk misi penjaga perdamaian dan mendukung program-program Uni Afrika seperti Pembangunan Pertanian dan Program Kemitraan Baru untuk Pembangunan Afrika. Dukungan Amerika Serikat ke Uni Afrika tidak merata dari tahun ke tahun (sumber: http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm - diakses pada 19 Juni 2010).

Bantuan dana yang diberikan oleh Amerika Serikat dialokasikan berdasarkan kasus per kasus. Pada tahun 2008, $ 96.400.000 diberikan dalam *Global Peace Operations Initiative* (GPOI), sebagian diberikan dalam program *African Contingency Operations Training and Assistance program* (ACOTA). ACOTA dirancang untuk meningkatkan kemampuan Afrika untuk merespon dengan cepat terhadap krisis dengan menyediakan militer melalui pelatihan dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan operasi kemanusiaan atau mendukung perdamaian.

Antara tahun 2006 sampai 2008, Amerika Serikat mengirim $ 908.000.000 untuk pasukan penjaga perdamaian PBB dan UA di Darfur. Amerika Serikat telah memberikan lebih dari $150.000.000 untuk misi penjaga perdamaian Uni Afrika di Somalia, dan pada bulan Agustus 2009 Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton berjanji untuk memberikan bantuan lebih banyak (sumber: http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm - diakses pada 19 Juni 2010).

Berikut ini tabel bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Uni Afrika :

Tabel 3.1.

Bantuan Dana untuk Uni Afrika

Anggaran	**Persentase %**	**Jumlah (juta €)**
1.Proses Transformasi Kelembagaan	20	20
2.Perdamaian, Keamanan, dan Tata Pemerintah	27.3	15
3.Integrasi Regional	23.6	13
- Infrastuktur		2
- Migrasi		2
- Teknologi dan ilmu pengetahuan		2
- Sektor lainnya		7
4.Visi Bersama	6.4	3,5
5.Koordinasi Program	2.7	1,5
6.Audit dan Evaluasi		0,5
7.Kontingen	3.6	1.5
TOTAL	**100**	**55**

(sumber:http://www.africaunion.org/root/AU/Conferences/Past/2006/October/EU-AU/060828%20AU%20Supp%20Prog%20summary%5Bfinal%5D.pdf – diakses pada 30 Juli 2010).

Keterangan :

1. Proses Transformasi Kelembagaan : Memperkuat kelembagaan komisi Uni Afrika seperti modernisasi sistem informasi, sistem keuangan; untuk mengelola hubungan yang efektif dengan organ-organ yang berbeda.
2. Perdamaian, Keamanan, dan Tata Pemerintah : untuk memberikan dukungan dalam upaya menciptakan perdamaian, keamanan, dan membangun tata pemerintah yang baik.
3. Integrasi Regional : dukungan kepada Uni Afrika untuk menjalankan perannya sebagai koordinator dan fasilitator dalam mengintegrasikan Afrika.
4. Visi Bersama : dukungan untuk kebijakan dan kerjasama Uni Eropa dan Uni Afrika serta mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
5. Koordinasi Program : dana yang dikeluarkan untuk membantu dalam membentuk dan melaksanakan suatu program
6. Audit dan Evaluasi : dana yang diberikan Uni Eropa dalam kegiatan audit maupun evaluasi
7. Kontingen : dana yang dialokasikan bagi pengiriman kontingen baik itu berupa pemantau, staf ahli maupun militer.

3.3.7. Intervensi Uni Afrika

Uni Afrika telah mengirimkan beberapa intervensi kemanusiaan dengan memperoleh sebuah keberhasilan. Pada Maret 2008 Uni Afrika melakukan Invasi Anjouan yaitu salah satu dari tiga pulau yang membentuk Komoro, mengakibatkan pemecatan pemimpin separatis di pulau itu.

Intervensi Uni Afrika pun dilakukan di Burundi pada tahun 2003, di mana sebuah pasukan perdamaian Uni Afrika yang berkekuatan sekitar 3.000 pasukan ditempatkan sampai pasukan PBB yang lebih besar tiba, kesuksesan tersebut secara luas telah diakui. Pada bulan Juni 2004, kekuatan Uni Afrika diserap ke dalam pasukan PBB sekitar 5.650 pasukan

(sumber: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6935033.stm - diakses pada 17 Juni 2010).

Mengingat sejarah singkat dari Uni Afrika dan pengalaman yang terbatas dengan penjaga perdamaian di benua Afrika, sebagian besar mengatakan pandangan masyarakat internasional bahwa masalah Darfur sebagai sebuah ujian untuk membuktikan kemampuan Uni Afrika untuk mempromosikan perdamaian di Afrika.

Tapi tetap saja Uni Afrika memerlukan dukungan politik dan materi yang luas dari masyarakat internasional untuk memberikan komitmen untuk mewujudkan keamanan dan perdamaian di Afrika. Lambatnya pengambilan keputusan dan kurangnya dana dari donor seperti Uni Eropa, G8, dan Amerika Serikat telah menghambat upaya perdamaian yang dilakukan oleh Uni Afrika.

3.4. *An African Union Mission In Somalia* (AMISOM)

An African Union Mission In Somalia (AMISOM) adalah misi penjaga perdamaian regional yang dioperasikan oleh Uni Afrika dengan persetujuan PBB. AMISOM melakukan Operasi Dukungan Perdamaian di Somalia untuk menstabilkan situasi keamanan, termasuk mengambil alih dari Pasukan Ethiopia, dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai dalam persiapan untuk transisi oleh PBB.

AMISOM dibentuk oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika pada tanggal 19 Januari 2007 dengan mandat enam bulan pertama. Pada tanggal 21 Februari 2007 Dewan Keamanan PBB menyetujui misi AMISOM. AMISOM didirikan pada bulan Januari 2007 untuk menggantikan pasukan Ethiopia yang menginvasi Somalia atas permintaan TFG untuk mengalahkan *Islamic Court Union* (ICU) yang telah menguasai sebagian besar Somalia.

AMISOM ini memiliki mandat untuk mendukung struktur pemerintahan transisi, menerapkan rencana keamanan nasional, melatih pasukan keamanan Somalia, dan untuk membantu dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Peran AMISOM dititikan pada peran untuk fasilitasi dan pemantauan.

3.4.1. Latar Belakang Didirikannya AMISOM

Pada tahun 1978, ketidakstabilan memuncak di Somalia dalam perang saudara dan runtuhnya pemerintah pusat dengan penggulingan rezim diktator Presiden Siad Barre pada tanggal 26 Januari 1991. Perang tersebut telah

mengganggu kestabilan Somalia dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan keamanan Somalia.

Senjata berat maupun ringan dalam jumlah besar jatuh ke dalam tangan warga sipil yang terorganisir dan membentuk milisi untuk mengambil alih kewenangan dari tangan polisi maupun pertahanan nasional. Kekejaman pun banyak dilakukan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, membunuh warga sipil, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, penahanan sewenang-wenang serta perekrutan secara paksa untuk menggunakan anak-anak sebagai tentara.

Pasukan penjaga perdamaian PBB yang mendahului operasi di Somalia yaitu UNOSOM I juga menarik kekuatan militernya pada bulan Maret 1992. Sebuah intervensi kemanusiaan dan pembangunan bangsa yang di pimpin oleh Amerika Serikat dan berada di bawah naungan PBB yang disebut dengan *United Nation of The Unified Task Force* (UNITAF) dimulai pada tahun 1993 untuk membantu memulihkan situasi yang aman di Somalia, namun UNITAF kemudian diganti menjadi UNOSOM II dan ditarik kembali pada tahun 1995 setelah pertempuran di Mogadishu yang mengakibatkan banyaknya pasukan Amerika Serikat menjadi korban.

Para panglima perang yang banyak beroperasi dan mengendalikan situasi di Somalia setelah ditariknya UNOSOM II akhirnya dikalahkan oleh *Islamic Court Union* (ICU) pada awal tahun 2006. Sementara beberapa panglima perang tersebut telah mencari perlindungan di negara-negara tetangga, yang lain diperkirakan bersembunyi di bagian lain Somalia. Sementara itu, ICU menguasai

dan mengontrol Mogadishu, ICU semakin berkembang dan mengontrol hampir sebagian besar Mogadishu.

Setelah mencoba dan beberapa kali gagal membangun Pemerintah Somalia yang baru, akhirnya pada bulan Oktober 2004 dibentuk suatu Pemerintahan Federal Transisi di Somalia yang dibantu oleh Pemerintah Kenya dengan pemilihan Abdullahi Yusuf sebagai Presiden Federal Transisi Somalia. Proses tersebut telah melahirkan *Transitional Federal Government* (TFG) yang hingga Juni 2004 masih dioperasikan dari Nairobi.

Pada akhir Juni 2004 TFG akhirnya dipindahkan ke Somalia. Pada awalnya pemindahannya TFG berada di Jowhar dan kemudian pindah ke wilayah Teluk Baidoa. TFG yang telah mendapatkan pengakuan oleh PBB dan Amerika Serikat membuat kemajuan yang cukup besar dalam bidang pelembagaan politik, khususnya pendirian Dewan Rekonsiliasi Nasional, serta pembentukan Mahkamah Agung, dan Mahkamah Regional serta dewan di tingkat kabupaten. Namun, kemajuan terhambat oleh kurangnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang tidak memadai. Situasi ini telah mempengaruhi pembentukan pasukan keamanan baru. Hal tersebut juga tidak memungkinkan TFG untuk menjangkau dan membangun kontrol atas semua wilayah dan masyarakat Somalia.

Situasi di Somalia berubah drastis dari saat TFG dibentuk. ICU muncul sebagai pemain utama dalam politik Somalia di samping TFG, ICU mulai membangun diri dan mulai mengendalikan Mogadishu dan meningkatkan pengaruhnya ke daerah lain sehingga mengesampingkan peran dari TFG. ICU

berusaha membuat otoritas politik di Somalia, berdasarkan pada hukum Syariah Islam.

TFG dan ICU menyatakan komitmen mereka untuk dialog dan rekonsiliasi, dan menyatakan kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam perundingan damai. Dalam hal ini, pihak-pihak yang menyatakan kesiapan mereka untuk membahas semua isu politik dan keamanan, termasuk situasi baru di Mogadishu, dan menyerukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk menjamin keberhasilan perundingan. Dua putaran perundingan damai yang berlangsung di Khartoum, Sudan, di bawah naungan Liga Arab tidak menghasilkan hasil yang diinginkan dan putaran ketiga gagal karena kedua belah pihak tidak juga menghasilkan kesepakatan bersama.

Adanya suatu gangguan dirasakan oleh beberapa negara yang terlibat dalam Proses Perdamaian di Somalia, Kedua belah pihak mengklaim keterlibatan pemain eksternal dan negara-negara dalam memberikan dukungan militer dan lainnya ke satu sisi atau sisi yang lain. Sementara TFG mengklaim bahwa ada teroris internasional dalam ICU dengan dukungan dari beberapa negara termasuk Eritrea, ICU di sisi lain menuduh pengerahan pasukan Ethiopia yang mendukung TFG tersebut.

Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi no. 1725 yang diadopsi pada tanggal 6 Desember 2006 yang dalam resolusi tersebut menyatakan untuk mengangkat sebagian embargo senjata dan memberikan kewenangan kepada negara-negara anggota Uni Afrika untuk membentuk pelatihan dan misi perlindungan di Somalia. Pada akhirnya TFG dan didukung oleh pasukan Ethiopia

melancarkan serangan besar-besaran terhadap ICU pada tanggal 25 Desember 2006 dan ICU pun jatuh pada tanggal 1 Januari 2006. Setelah kekalahan dari ICU, beberapa pejuang mereka meninggalkan seragam mereka dan kembali bergabung dengan klan mereka sementara yang lain mundur menuju perbatasan Kenya. ICU melakukan serangan secara bergerilya terhadap pasukan Ethiopia di Somalia dan di tempat lain sampai Ethiopia menarik diri dari negeri ini.

Masyarakat internasional menyerukan Ethiopia untuk menarik pasukannya dari Somalia dan juga disadari bahwa Somalia akan menjadi negara anarki tanpa kekuatan yang kuat untuk menggantikan Etiopia dalam membantu TFG untuk mengkonsolidasikan posisinya. Situasi seperti ini memperkuat keinginan Uni Afrika untuk membantu meredakan konflik yang terjadi di Somalia. Namun karena larangan yang diberikan pada negara-negara garis depan untuk campur tangan di Somalia serta masalah administrasi lain menyebabkan Uni Afrika membuat suatu keputusan untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian yang disebut dengan *An African Union Mission in Somalia* (AMISOM) pada tanggal 19 Januari 2007 sesuai dengan mandat Komisi Uni Afrika untuk memberikan Dukungan Misi Perdamaian di Somalia.

Mengingat situasi keamanan yang memburuk di Somalia, Pemerintah Somalia mengeluarkan komunike pada pertemuan 31 Januari 2005 di Abuja, Nigeria dengan tujuan untuk menggelar Misi Dukungan Perdamaian ke Somalia. Komunike disediakan untuk mendukung keamanan kepada TFG untuk memastikan relokasi untuk Somalia, proses perdamaian dan membantu pembentukan kembali perdamaian dan keamanan termasuk pelatihan dari

Kepolisian dan Angkatan Darat. Maksud dari komunike ini disahkan oleh Sidang Keempat Biasa Uni Afrika dan selanjutnya disahkan oleh keputusan Rapat 24 dari *Peace and Security Council* (PSC) dari Uni Afrika yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2005.

3.4.2. Tugas AMISOM

Untuk memenuhi tujuannya AMISOM juga diberi berbagai tugas yaitu antara lain :

- Mendukung dialog & rekonsiliasi di Somalia, dan bekerja dengan semua pemangku kepentingan.
- Memberikan perlindungan terhadap TFG & membangun infrastruktur untuk memungkinkan mereka melaksanakan fungsi mereka.
- Memberikan bantuan teknis dan dukungan lainnya bagi perlucutan senjata dan upaya stabilisasi.
- Memantau situasi keamanan di daerah operasi.
- Memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan juga termasuk repatriasi pengungsi.
- Melindungi personil AMISOM, instalasi dan peralatan, termasuk pertahanan diri.

3.4.3. Kepala Misi AMISOM

Nicholas Bwakira diangkat pada bulan Desember 2007 oleh Ketua Komisi Uni Afrika sebagai Perwakilan Khusus-nya untuk Somalia. Visinya adalah untuk membawa semua upaya untuk Somalia yang aman, damai dan demokratis. Misi dari Bwakira dalam memimpin AMISOM adalah kontribusi untuk koordinasi yang efektif dari kebijakan internasional dan kegiatan untuk Somalia di bidang politik, keamanan dan sektor kemanusiaan serta rehabilitasi Lembaga Nasional Somalia.

Untuk berhasil mencapai tugasnya Bwakira menerapkan Strategi berikut:

- Berinteraksi dan melibatkan semua *stakeholder* serta pembuat kebijakan Somalia, Regional dan Internasional;
- Memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Somalia;
- Memobilisasi sumber daya dan membuat laporan mengenai AMISOM.

Panglima Angkatan AMISOM Mayor Jenderal Levi Karuhanga ditunjuk oleh Dewan Perdamaian Keamanan Uni Afrika untuk jangka waktu 6 bulan sejak 1 Maret 2007. Di bawah kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk kinerja dan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dimandatkan.

Levi berhasil memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan, pemantauan keamanan di daerah penyebaran mandat dan melindungi personil AMISOM, dan juga memfasilitasi instalasi dan peralatan. Dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya berupa kegiatan politik dan keamanan beberapa hasil yang dilakukan telah berhasil dicapai.

3.4.4. Komponen Militer AMISOM

Pada bulan Januari 2007, Uni Afrika dan Dewan Keamanan mengerahkan AMISOM dengan 9 batalyon infanteri. Dari 9 batalion resmi, hanya 3 batalion sejauh ini yang telah dikerahkan. Diharapkan Burundi akan segera mengirimkan Batalyon lain yang nerupakan battalion ke 4. Dalam upaya untuk memobilisasi lebih banyak pasukan untuk misi tersebut, Uni Afrika telah berkonsultasi dengan Nigeria yang berjanji untuk mengirimkan pasukan. Diskusi juga berlangsung dengan negara-negara Afrika lainnya untuk menyediakan pasukan. Beberapa negara telah bersedia untuk mengirimkan bantuan tetapi masih terhambat dengan masalah kekurangan logistik dan keuangan untuk melakukannya (sumber: http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/amisom.htm - diakses pada 15 Juni 2010).

Namun, pengerahan pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika ke Somalia pada tahun 2007 sangat terbatas. Dari delapan ribu pasukan yang dijanjikan, hanya 2.700 tentara dari Burundi dan 2.550 tentara Uganda yang telah dikerahkan pada bulan Agustus 2009. Uni Afrika mendesak PBB untuk mengambil alih peran Uni Afrika di Somalia. Beberapa anggota Dewan Keamanan PBB telah menyatakan keraguan seperti tentang penyebaran tentara dan ketidakmampuan TFG untuk meningkatkan keamanan di negara ini (sumber:http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.2876199/ - diakses pada 17 Juni 2010).